



Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2020

Ricky Sheldy Putra Setiawan¹, Maryono²

^{1,2}Universitas Stikubank Semarang

¹rickysheldy92@gmail.com ²maryono@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 24 Juli 2022

Disetujui 26 Agustus 2022

Diterbitkan 25 September 2022

Kata kunci:

Ukuran pemerintah daerah; Tingkat ketergantungan pemerintah daerah; Pendapatan asli daerah; Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah; Laporan hasil pemeriksaan

Keywords :

Size of local government; Level of dependency of local government; Locally-generated revenue; Level of disclosure of local government financial statements; Inspection report

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (UPD), Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengungkapan LKPD pada kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 2018-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh LHP 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2018-2020 yang diperoleh langsung dari BPK RI. Terdapat total sebanyak 105 sampel yang diperoleh melalui teknik pengambilan Sampel Sensus atau pengambilan keseluruhan populasi untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan metode observasi guna menganalisa informasi terkait dengan data yang dibutuhkan untuk kebutuhan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) dapat berpengaruh secara positif signifikan, dimana semakin besar nilai UPD, maka akan semakin besar pula tingkat pengungkapan LKPD. Begitu Juga dengan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD) yang juga berpengaruh secara positif signifikan, dimana semakin besar nilai dari TKPD, maka akan turut meningkatkan pengungkapan LKPD. Akan tetapi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan. Sehingga semakin besar nilai PAD, maka akan semakin turun tingkat pengungkapan LKPD.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze how the influence of Local Government Size (UPD), Local Government Dependence Level (TKPD), and Regional Original Income (PAD) on LKPD Disclosure in districts/cities in Central Java during the 2018-2020 period. The population in this study were all LHP 35 districts/cities in Central Java Province during the period 2018-2020 which were obtained directly from BPK RI. There were a total of 105 samples obtained through the Census Sampling technique or taking the entire population to serve as research samples. This research uses the observation method to analyze information related to the data needed for research needs. Based on the results of the research that has been done, it is found that the size of the Regional Government (UPD) can have a significant positive effect, where the greater the UPD value, the greater the level of LKPD disclosure. Likewise with the Local Government Dependence Level (TKPD) which also has a significant positive effect, where the greater the value of the TKPD, the greater the disclosure of LKPD. However, Regional Original Income (PAD) has a negative and insignificant effect. So that the greater the PAD value, the lower the level of LKPD disclosure will be.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Rakyat Indonesia memiliki otoritas, dan karenanya kedaulatan, bangsa di bawah sistem demokrasi yang ada di sana. Dalam skenario ini, pemerintah adalah pihak yang dipilih oleh rakyat untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk kepentingan seluruh masyarakat. Dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan rakyat (Amaliah & Haryanto, 2019). Otonomi daerah atau pelimpahan wewenang antara Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah telah diatur sedemikian rupa di Indonesia dengan landasan yuridis berupa UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Pemerintah, 1999). Seiring dengan perkembangannya, kini masing-masing Pemerintah Daerah kabupaten atau kota memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan berbagai

macam potensi yang ada di daerah dengan didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan, peran serta masyarakat, serta keadilan. Pelimpahan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah ini juga turut disertai oleh adanya pengaturan, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, pembagian, serta juga perimbangan keuangan. Namun kenyataannya, belum semua pemerintah daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan tersebut secara efisien.

Laporan keuangan yang jelas dan transparan dibutuhkan bagi para pembaca untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan politik, sosial, serta ekonomi secara berkualitas. Meskipun memang ada media lain yang dapat dijadikan sumber informasi akuntansi seperti laporan statistik, berita media, atau proyeksi, tetapi laporan keuangan tetap menjadi penting demi mewujudkan pengambilan keputusan yang tepat dari informasi keuangan di dalamnya. Tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting yang harus dijaga demi menjaga akuntabilitas keuangan pemerintah. Besarnya tingkat ketergantungan daerah dan kompleksitas pemerintahan diduga merupakan faktor pendorong bagi pemerintah daerah dalam menjaga reputasi melalui akuntabilitas laporan keuangannya (Pandansari, 2016).

Salah satu bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak pembaca adalah laporan keuangan dari pemerintah daerah. Sehingga dari sini pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyampaian laporan keuangan secara wajar. Laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat bagi penggunaannya apabila tersaji secara valid, dapat diandalkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, laporan keuangan dikatakan masih buruk apabila tidak tersaji sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Adapun standar pelaporan keuangan tercantum dalam PP Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Pemerintah, 2010).

Berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan LKPD telah dilakukan sebelumnya dengan hasil yang berbeda-beda. Beberapa variabel yang dikaitkan dengan tingkat pengungkapan LKPD dalam penelitian-penelitian tersebut adalah Ukuran Pemerintah Daerah (UPD), Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga item variabel tersebut sama pentingnya untuk ditunjukkan secara jelas kepada publik atau pihak yang bekepentingan di dalam susunan laporan keuangan daerah. Setiap pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan transparansi informasi yang jelas dalam upaya pengungkapan laporan keuangan (Lutfia & Bagana, 2018).

Besar atau kecilnya ukuran suatu pemerintah daerah dapat dilihat berdasarkan total nilai aset yang dimiliki oleh daerah tersebut. Total aset ini haruslah tercantum di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Tuntutan semacam ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Arza, 2015), dimana dari penelitian tersebut, diperoleh bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapannya dalam laporan keuangan. Namun meski begitu, penelitian lain yang dilakukan oleh (Setyaningrum D & Syafitri F, 2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara nilai ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan dalam laporan keuangan daerah.

Sementara itu, tingkat ketergantungan pemerintah daerah merujuk pada kemampuan dari pemerintah daerah untuk tidak selalu menggantungkan diri pada anggaran yang dialirkan oleh pemerintah pusat, dimana anggaran ini biasanya disajikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini sesuai dengan ketentuan otonomi daerah, dimana setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola berbagai macam potensi yang ada di masing-masing daerah yang menjadi wewenangnya agar dapat menciptakan anggaran sendiri guna kebutuhan pengembangan di daerahnya. Sehingga dari sini dapat dinilai seberapa mandiri suatu pemerintah daerah dalam membangun daerah kekuasaannya. Pemerintahan daerah tentunya memiliki keharusan untuk menjelaskan secara jelas terkait gambaran tingkat ketergantungan tersebut. Sehingga dapat menghadirkan manfaat yang signifikan terhadap pihak-pihak terkait, terutama pemerintah pusat dan masyarakat. Dimana dalam hasil penelitian tersebut, diperoleh bahwa Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD) berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintahan daerah. Tetapi, penelitian lain yang dilakukan oleh (Ramdhani, 2016) memperoleh hasil yang negatif dan tidak signifikan antar variabel tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan anggaran yang dimiliki secara murni oleh pemerintah daerah, dimana anggaran tersebut berasal dari beberapa sumber. Beberapa macam sumber anggaran tersebut adalah Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nilai dari masing-masing sumber dana Pendapatan Asli Daerah ini biasanya akan dicantumkan pada muka laporan keuangan daerah. Besar atau kecilnya pendapatan asli daerah ini juga memberikan indikasi terkait kemandirian suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Hal ini juga sekaligus menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal dan mampu mengurangi ketergantungan akan anggaran dari pemerintah pusat. Berbagai macam penelitian telah dilakukan terkait dengan pendapatan asli daerah ini. Seperti yang dilakukan oleh (Hilmi & Martani, 2012), dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapannya di dalam laporan keuangan. Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh (Khasanah & Rahardjo, 2014) menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap tingkat pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan susunan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap adanya transparansi dalam pengungkapan laporan keuangan daerah. Hal ini mengingat pentingnya laporan yang jelas terutama terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD), serta Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) di dalam suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Keterbukaan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan haruslah diterapkan agar dapat tercipta manfaat yang signifikan dari laporan tersebut kepada penggunanya. Hal ini juga sesuai dengan Teori Stewardship, dimana suatu pemerintah daerah didorong untuk bertanggungjawab untuk menghasilkan laporan keuangan yang jelas, wajar, dan transparan demi memenuhi kebutuhan kepada para pengguna laporan tersebut. Sehingga dari sini dapat tercipta suatu good governance atau kepercayaan kepada pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu merupakan data yang berbentuk angka atau yang dipersamakan (data yang dibuat menjadi angka) dimana metode ini sendiri digunakan untuk menganalisa pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen dengan didasarkan pada data berbentuk angka (Sugiyono, 2017).

Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data yang sudah tercatat, tersedia ataupun disediakan dalam bentuk buku, laporan ataupun hasil pemeriksaan dari sumber tertentu. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan diperoleh dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Data penelitian diperoleh dari laporan-laporan tersebut melalui adanya teknik dokumentasi.

Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah seluruh LHP Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu 35 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota yang ada di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2018-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel pebuh atau sampel sensus. Sehingga dengan begitu, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh LHP dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2020 dengan total keseluruhan sebanyak 105 sampel.

Tabel 1 Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
1.	LHP kabupaten/kota tahun 2018	35
2	LHP kabupaten/kota tahun 2019	35
3	LHP kabupaten/kota tahun 2020	35
Jumlah Sampel Penelitian		105

Definisi Konsep dan Operasional

Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah berupa Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Maksud dari variabel ini yaitu berupa perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Hasil dari perbandingan ini akan memberikan gambaran tentang besarnya tingkat pengungkapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dibandingkan dengan pengungkapan wajib yang seharusnya disajikan dalam CaLK menurut SAP yang berlaku. Adapun berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Pemerintah, 2010), terdapat sebanyak 53 item pengungkapan wajib yang seharusnya ada dalam CaLK.

Sehingga data variabel dependen Tingkat Pengungkapan LKPD ini dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$DISCLOSURE = \text{Pengungkapan dalam LKPD} / \text{Pengungkapan dalam SAP}$

Variabel Independen

Ukuran Pemerintah Daerah adalah salah satu variabel yang dapat diukur dengan menggunakan total aset dan dapat menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah tersebut. Semakin besar total aset maka semakin besar pula Ukuran Pemerintah Daerah tersebut. Rumus daripada pengukuran variable ukuran pemerintah daerah ini adalah :

$UPD = \text{Ln (Realisasi Total Aset)}$

Proporsi total pendapatan pemerintah daerah yang didanai dari DAU mencerminkan Tingkat Ketegantungan Pemerintah Daerah. Penghitungan nilai tota pendapatan pemerintah daerah ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai realisasi DAU yang biasanya terdapat pada muka laporan keuangan, dengan total nilai pendapatan daerah. Adapun rumus pengukuran Tingkat Pendapatan Pemerintah Daerah ini adalah :

$TKPD = \text{Nilai Realisasi DAU} / \text{Total Pedapatan Daerah}$

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemerintah, 2004) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Rumus untuk menghitung nilai dari PAD ini adalah :

$PAD = \text{Realisasi Nilai PAD}$

Metode Analisis Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan guna menguji apakah variabel pengganggu dalam model regresi penelitian memiliki distribusi yang normal (Ghozali dalam Rizky Primadita dan Isroah, 2018:148). Pengujian ini dilakukan dengan rumus One Sample Kolmogorov-Smirnov pada SPSS. Cara untuk menginterpretasikan hasil dari pengujian ini adalah :

1. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka variabel pengganggu berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel pengganggu tidak berdistribusi normal

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji regresi ganda, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik guna menganalisa apakah variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini layak untuk diproses lebih lanjut dengan uji regresi tersebut. Uji asumsi klasik ini sendiri terdiri atas 3 macam uji, yaitu uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Rincinan dari masing-masing uji tersebut adalah sebagai berikut.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen di dalam model regresi penelitian (Ghozali dalam Rizky Primadita dan Isroah, 2018:148). Pendeteksian uji ini dilakukan berdasarkan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka model regresi penelitian tersebut bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menganalisa apakah di dalam sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya (Ghozali dalam Rizky Primadita dan Isroah, 2018:148). Uji semacam ini dilakukan dengan rumus SPSS yang bernama Uji Rank Spearman. Suatu model regresi penelitian dapat dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi dari hasil uji tersebut lebih dari 0,05. Sedangkan sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan guna menganalisa apakah model regresi penelitian memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan periode $t-1$ atau periode sebelumnya. Uji ini dilakukan dengan rumus Uji Durbin-Watson (Uji DW) pada SPSS. Pada uji ini, terdapa 5 macam kriteria interpretasi hasil uji. Kelima kriteria tersebut adalah :

1. Jika $0 < d < dL$, maka tidak terdapat autokorelasi yang positif dan keputusannya ditolak.
2. Jika $dL \leq d \leq dU$, maka tidak ada korelasi positif dan keputusan no decision.
3. Jika $4-dL < d < 4$, maka tidak ada korelasi negatif dan keputusan ditolak.
4. Jika $4-dU \leq d \leq 4-dL$, maka tidak ada korelasi negatif dan korelasi no decision.
5. Jika $dU < d < 4-dU$, maka tidak ada korelasi positif ataupun negatif dan keputusan diterima.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Guna melakukan uji hipotesis dalam penelitian ini, maka metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis tersebut bertujuan untuk menganalisa bagaimana perubahan pada variabel dependen (Pengungkapan LKPD) jika terdapat peningkatan atau penurunan pada beberapa variabel independen yang berupa Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah. Adapun SPSS digunakan untuk melakukan analisis ini. Pengambilan keputusan untuk melihat hasil dari analisis regresi linear berganda ini dilakukan dengan melihat 3 macam kategori hasil uji di dalamnya, yakni Uji F Simultan, Uji t-Statistik dan Uji Koefisien Determinasi.

Uji F Simultan

Uji F atau uji simultan ini bertujuan untuk meninjau apakah semua variabel independen dalam suatu penelitian dapat secara bersamaan memengaruhi variabel dependen (Ghozali dalam Muhammad Yusuf, 2017:176). Adapun jika nilai signifikansi pada tabel ANOVA lebih kecil dari 0,05, maka semua variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau serempak terhadap variabel dependen. Namun jika nilai signifikansinya lebih besar, maka tidak ada pengaruh secara simultan.

Uji t-Statistik

Uji semacam ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di dalam suatu penelitian (Widjarjono dalam Setiawan & Hendri, 2017:3). Suatu hipotesis akan diterima jika nilai signifikansinya $< 0,05$ atau nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$. Namun jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka hipotesis ditolak.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu penelitian. Hasil dari uji semacam ini dapat dilihat dari tabel Model Summary yang dihasilkan dari analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data pada setiap variabel dalam bentuk nilai minimum, maksimum, rata-rata, hingga standar deviasi. Adapun data hasil uji secara statistik deskriptif ini data dilihat dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Tabel Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UPD	10	Rp	Rp	Rp	Rp
	5	2.083.375.254.6	30.970.860.367.2	4.576.362.007.7	3.729.626.114.2
TKPD	10	52	10	61	16
	5	0,269	0,509	0,43918	0,039109
PAD	10	Rp	Rp	Rp	Rp
	5	179.813.870.000	4.409.163.433.33	682.530.487.846	764.589.254.068
Pengungkap an LKPD	10	0,642	0,849	0,67983	0,032052
	5				
Valid N (listwise)	10				
	5				

Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (UPD)

Berdasarkan hasil uji deskriptif statistik pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa wilayah dengan nilai UPD terendah selama periode 2018-2020 adalah Kabupaten Demak tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp 2.083.375.254.652. Sedangkan wilayah dengan nilai UPD terbesar merupakan ibukota Jawa Tengah yakni Kota Semarang tahun 2018 dengan nilai UPD mencapai Rp 30.970.860.367.210. Secara keseluruhan, rata-rata nilai UPD untuk seluruh wilayah dalam periode 3 tahun tersebut adalah sebesar Rp 4.576.362.007.761. Sementara itu, nilai standar deviasi Rp 3.729.626.114.216 yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya menandakan bahwa simpangan data pada variabel UPD relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebaran data yang baik pada variabel ini.

Variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD)

Berdasarkan tabel deskriptif statistik di atas, ditemukan bahwa nilai TKPD atau Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah pada pendapatan daerah terbesar adalah Kabupaten Temanggung tahun 2019 dengan tingkat ketergantungan mencapai 0,509. Sedangkan wilayah yang memiliki nilai TKPD terendah adalah Kota Semarang tahun 2020 dengan nilai sebesar 0,269. Apabila ditinjau secara keseluruhan, maka rata-rata tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah pada pendapatan daerah adalah sebesar 0,43918. Nilai standar deviasi pada variabel TKPD ini juga lebih rendah dari nilai rata-ratanya, yakni sebesar 0,039109. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat simpangan data yang relatif kecil dan sebaran data yang baik pada variabel ini.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan data pada tabel deskriptif statistik tersebut, ditemukan bahwa nilai PAD terendah pada di antara 35 kabupaten/kota selama periode 2018-2020 adalah Kabupaten Wonosobo tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp179.813.870.000. Sedangkan nilai tertingginya berada pada Kota Semarang tahun 2019 dengan nilai PAD yang mencapai Rp4.409.163.433.330. Sedangkan secara keseluruhan, nilai PAD rata-ratanya adalah sebesar Rp 682.530.487.846. Nilai standar deviasi pada variabel ini adalah Rp 764.589.254.068. Nilai ini lebih besar dari nilai rata-ratanya dan menunjukkan bahwa

terdapat penyebaran data yang relatif luas dan beragam, atau dengan kata lain data dari variabel PAD ini bersifat heterogen.

Variabel Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Guna menentukan tentang seberapa terbuka pengungkapan LKPD pemerintah tersebut, maka terdapat tabel kategori yang didasarkan pada jumlah item SAP sebagai berikut.

Tabel 3 Kategori Pengungkapan LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Kategori	Skor
1	Kurang Baik (KB)	0 – 0,327
2	Cukup Baik (CB)	0,33 – 0,66
3	Sangat Baik (SB)	0,67 - 1

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh bahwa nilai tingkat pengungkapan LKPD tertinggi adalah pada Kota Semarang tahun 108 dengan nilai 0,849. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat baik dalam hal pengungkapan LKPD. Sedangkan wilayah dengan tingkat pengungkapan terendah berada pada wilayah beberapa wilayah dengan nilai 0,642. Wilayah-wilayah tersebut antara lain adalah :

1. Tahun 2018 : Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Purbalingga.
2. Tahun 2019 : Kabupaten Demak, Kabupaten Magelang, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Tegal.
3. Tahun 2020 : Kabupaten Demak dan Rembang.

Nilai 0,642 tersebut termasuk dalam kategori cukup baik dalam pengungkapan LKPD. Apabila ditinjau secara keseluruhan, maka rata-rata tingkat pengungkapan LKPD adalah senilai 0,67983. Nilai ini mengartikan bahwa pengungkapan LKPD untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori sangat baik. Nilai standar deviasi dari variabel ini sendiri lebih rendah dari nilai rata-rata, yakni sebesar 0,032052. Hal ini menandakan bahwa simpangan data pada variabel ini relatif kecil dan memiliki sebaran data yang baik.

Analisis Data Uji normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			105
Normal Parameters ^a	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,01385350
Most Extreme Differences	Absolute		,059
	Positive		,059
	Negative		-,058
Test Statistic			,059
Asymp. Sig. (2-tailed)			,200 ^{c · d}
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut, diperoleh bahwa nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini kemudian dapat dimaknai bahwa variabel penelitian dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk meninjau apakah variabel penelitian layak untuk dilakukan analisis regresi tersebut. Berikut ini adalah rincian hasil dari uji asumsi klasik tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations			UPD	PAD	TKPD	Pengungkapan LKPD
Spearman's rho	UPD	Correlation	1,000	-.020	,008	-,010
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	.	,837	,937	,920
		N	105	105	105	105
	PAD	Correlation	-,020	1,000	,104	-,024
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	,837	.	,293	,808
		N	105	105	105	105
	TKPD	Correlation	,008	,104	1,000	-,052
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	,937	,293	.	,597
		N	105	105	105	105
Pengungkapan LKPD	Correlation	-,010	-,024	-,052	1,000	
	Coefficient					
	Sig. (2-tailed)	,920	,808	,597	.	
	N	105	105	105	105	

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas tersebut, didapatkan bahwa nilai signifikan dari masing-masing variabel independen yang terdiri atas UPD (0,920), TKPD (0,597), dan PAD (0,808) memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 6 Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	TKPD	,646	1,548
	UPD	,645	1,551
	PAD	,970	1,031

a. Dependent Variable : Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dalam tabel tersebut, diperoleh bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel independen (UPD (0,645); PAD (0,970); TKPD (0,646)) memiliki nilai yang lebih dari 0,10. Selain itu, nilai VIF dari masing-masing variabel tersebut (TKPD (1,548); PAD (1,031); UPD (1,551)) juga memiliki nilai kurang dari 10. Sehingga dari sini dapat dianalisa bahwa variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,280 ^a	,078	,021	,45388232	2,208

a. Predictors : (Constant), PAD, UPD, TKPD
 b. Dependent Variable : Pengungkapan LKPD

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diperoleh nilai Durbin-Watson (d) memiliki nilai 2,208. Guna menginterpretasikan hasilnya, maka nilai tersebut perlu dibandingkan dengan nilai dU yang diperoleh pada tabel distribusi nilai Durbin-Watson. Adapun rumus dU adalah $k ; N$.

Nilai k merupakan jumlah variabel independen dalam penelitian yang memiliki jumlah 3. Sementara N adalah jumlah sampel data penelitian yakni 105 sampel. Kemudian, dengan persamaan rumus tersebut ($3 ; 105$), maka diperoleh nilai dU sebesar 1,7411. Sehingga dengan diperolehnya nilai dU, maka perbandingan hasil uji autokorelasi menjadi $1,7411 < 2,208 < 2,2589$. Hasil ini mengartikan bahwa tidak ada korelasi yang positif atau negatif dan model regresi penelitian dapat diterima.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8 Hasil Uji Regresi linear berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients				
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,587	0,020		28,668	0,000
	UPD	0,000	0,000	0,989	18,461	0,000
	TKPD	0,128	0,044	0,157	2,929	0,004
	PAD	0,000	0,000	-0,073	-1,673	0,098

a. Dependent Variable : Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil dari uji regresi linear berganda tersebut, maka diperoleh bentuk persamaan sebagai berikut.

$$Y = 0,587 + 0,000 \text{ UPD} + 0,128 \text{ TKPD} + 0,000 \text{ PAD}$$

Adapun interpretasi dari persamaan tersebut antara lain adalah :

1. Nilai konstanta sebesar 0,587 menandakan bahwa jika nilai masing-masing dari variabel independen UPD (X1), TKPD (X2) dan PAD (X3) sama dengan 0, maka nilai konsisten variabel dependen yang berupa Pengungkapan LKPD (Y) bernilai 0,587.
2. Nilai koefisien regresi variabel UPD (X1) sebesar 0,000 menunjukkan bahwa setiap kali terjadi kenaikan nilai variabel X1 sebesar 1%, maka nilai variabel dependen Pengungkapan LKPD (Y) juga akan naik sebesar 0,000. Nilai koefisien yang positif tersebut juga mengartikan bahwa variabel independen UPD dapat memberikan pengaruh yang positif atau searah terhadap variabel dependen.
3. Nilai koefisien regresi variabel TKPD (X2) memiliki besar senilai 0,128. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kali terjadi kenaikan pada variabel independen X2 sebesar 1%, maka nilai variabel dependen Y akan naik sebesar 0,128. Nilai koefisien yang positif tersebut juga mengartikan bahwa variabel independen TKPD dapat memberikan pengaruh yang positif atau searah terhadap variabel dependen Y.
4. Nilai koefisien regresi variabel PAD (X3) sebesar 0,000 menunjukkan bahwa setiap kali terjadi kenaikan nilai variabel X3 sebesar 1%, maka nilai variabel dependen Pengungkapan LKPD (Y) akan naik sebesar 0,000. Nilai koefisien yang positif tersebut mengartikan bahwa variabel independen PAD dapat memberikan pengaruh yang positif atau searah terhadap variabel dependen Y.

Guna mendukung hasil dari persamaan regresi tersebut, maka melalui hasil dari analisis regresi linear berganda ini juga terdapat 3 macam uji untuk menginterpretasikan hasil analisis secara lebih rinci. 3 macam uji tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9 Hasil Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	,087	3	,029	146,549	,000 ^b
	Residual	,020	101	,000		
	Total	,107	104			

a. Dependent Variable : Pengungkapan LKPD
 b. Predictors : (Constant), PAD, TKPD, UPD

Berdasarkan hasil uji F tersebut, diperoleh nilai F-hitung 146,549 dengan signifikansinya kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini menandakan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini (Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah) secara simultan atau serempak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Pengungkapan LKPD).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,902 ^a	,813	,808		,014058

a. Predictors : (Constant), PAD, TKPD, UPD

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi pada analisis regresi linear berganda tersebut, diperoleh bahwa nilai Adjusted R Squarenya adalah sebesar 0,808 atau 81%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Ukuran Pemerintah Daerah (UPD), Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberikan pengaruh terhadap variabel dependen Pengungkapan LKPD sebesar 81%. Sedangkan 19% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Uji t-Statistik

Tabel 11 Hasil Uji t-Statistik

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	0,587	0,020		28,668	0,000
	UPD	0,000	0,000	0,989	18,461	0,000
	TKPD	0,128	0,044	0,157	2,929	0,004
	PAD	0,000	0,000	-0,073	-1,673	0,098

a. Dependent Variable : Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil uji t-statistik pada analisis regresi linear berganda tersebut, diperoleh bahwa :

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) Terhadap Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil uji tersebut, diperoleh nilai t-hitung variabel Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) adalah sebesar 18,461 dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal tersebut mengartikan bahwa **hipotesis H1 diterima** karena variabel independen UPD (X1) ini **secara signifikan dapat memberikan pengaruh positif** kepada variabel dependen yang berupa pengungkapan LKPD.

2. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD) Terhadap Pengungkapan LKPD

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh bahwa nilai t-hitung pada variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD) adalah 2,929 dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yakni sebesar 0,004. Hal tersebut mengartikan bahwa **hipotesis H2 diterima** karena variabel independen TKPD (X1)

tersebut **secara signifikan dapat memberikan pengaruh positif** kepada variabel dependen yang berupa pengungkapan LKPD (Y).

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil uji tersebut, diperoleh bahwa nilai t-hitung pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar $-1,673$ dengan signifikansi yang lebih besar dari $0,05$ ($0,098 < 0,05$). Hal tersebut menunjukkan bahwa **hipotesis H3 ditolak** karena variabel independen PAD (X3) tersebut memberikan pengaruh yang **negatif dan tidak signifikan** kepada variabel dependen yang berupa pengungkapan LKPD (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) Terhadap Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil uji regresi ganda yang sebelumnya telah dilakukan, diperoleh bahwa variabel independen X1 Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pengungkapan LKPD selama periode tahun 2018-2020. Hal ini karena pada hasil uji regresi linier berganda diperoleh nilai signifikan UPD $0,000$ lebih kecil dari $0,05$ dengan nilai uji-t $18,461$.

UPD itu sendiri merupakan total seluruh aset daerah mulai dari aset lancar, aset tetap, investasi jangka panjang, hingga aset lainnya. Aset ini menjadi sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara jangka panjang di masa depan secara ekonomi ataupun sosial. Keterbukaan atau transparansi atas pengungkapan LKPD terutama dalam hal aset sangatlah diperlukan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Pemerintah, 2010). UPD sendiri merupakan bagian dari mandatory disclosure atau pengungkapan yang wajib ada dalam LKPD. Segala hal terkait dengan pelaporan aset daerah perlu disampaikan melalui LKPD dibagian muka laporan secara jelas, sewajarnya, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tentunya juga tidak lepas dari fakta bahwa aset-aset tersebut pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan kesejahteraan daerah, serta dapat didayagunakan demi meningkatkan nilai UPD. Transparansi ini juga sangat berguna bagi pengguna laporan ataupun masyarakat untuk menilai bagaimana kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola aset-aset tersebut. Kewajiban transparansi laporan UPD ini juga sesuai dengan penerapan dari Teori Steward.

Besar atau kecilnya aset daerah dapat menjadi tolak ukur mengenai bagaimana Ukuran Pemerintah Daerah (UPD). Sehingga semakin besar UPD suatu daerah kabupaten/kota, maka akan semakin Pemerintah Daerah dituntut untuk transparan dalam pengungkapan aset daerah di LKPD. Sehingga UPD dapat memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan LKPD. Hal ini juga selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferina, et al (2018), Meri Andriani, et al (2019), (Nur & Murwaningsari, 2020), serta (Anggara & Cheisviyanny, 2020), dimana mereka menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pengungkapan LKPD.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD) Terhadap Pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh bahwa variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pengungkapan LKPD. Pengaruh yang positif signifikan ini dapat dibuktikan dari hasil uji regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa TKPD memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari $0,05$ yakni $0,004$ dengan nilai uji-t $2,929$.

Nilai dari pada TKPD dalam suatu laporan keuangan daerah menggambarkan seberapa besar ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Adanya pembagian anggaran seperti Dana Alokasi Umum ini selanjutnya menjadi sebuah wujud upaya pemerataan anggaran antar daerah agar dapat tercipta keadilan, kesejahteraan, serta transparansi keuangan yang jelas. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum atau DAU sendiri merupakan bentuk anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN untuk keperluan pemerataan kemampuan antar daerah guna mendukung biaya pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan desentralisasi. Sehingga dari sini jelas bahwa dikarenakan pentingnya anggaran DAU ini, maka Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan terkait dengan bagaimana realisasi penggunaan anggaran DAU ini.

Sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Pemerintah, 2010), TKPD termasuk mandatory disclosure atau pengungkapan yang wajib dicantumkan dalam pelaporan LKPD. Pelaporan yang jelas dan dinyatakan dengan sewajarnya dapat

membuat tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan anggaran semakin baik. Hal ini juga selaras dengan Teori Steward yang menyatakan bahwa tujuan dari penyusunan laporan LKPD adalah untuk kepentingan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap masyarakat agar tercipta good governance atau pemerintah yang dapat dipercaya, kinerja yang berintegritas, serta bertanggungjawab.

Sehingga, dari sini dapat disimpulkan bahwa semakin besar TKPD kabupaten/kota, maka akan semakin besar pula tuntutan bagi Pemerintah Daerah untuk menyajikan pengungkapan TKPD tersebut di dalam LKPD secara jelas dan terperinci. Hasil dari penelitian ini juga selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Andriani et al., 2019), Era Fatwa dan Haryanto (2019), (Anggara & Cheisviyanny, 2020), serta (Nur & Murwaningsari, 2020), dimana mereka menyatakan bahwa Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pengungkapan LKPD.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengungkapan

Berdasarkan hasil dari uji regresi linear berganda, diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh yang tidak signifikan dan negatif terhadap pengungkapan LKPD, dimana nilai signifikansi dari PAD tersebut lebih besar dari 0,05 yaitu 0,098 dan nilai uji t -1,673.

Pendapatan Asli Daerah menggambarkan seberapa besarnya upaya daripada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di daerah yang menjadi otonominya. Hal ini juga sesuai dengan penerapan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemerintah, n.d.), dimana dalam peraturan perundangan di sana dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki cakupan wewenang yang luas untuk mengurus sendiri urusan rumah tangga daerahnya, salah satunya adalah memaksimalkan sumber anggaran dari daerah sendiri demi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya perlu ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan perkembangan di daerahnya. PAD ini juga dapat menjadi tolak ukur terkait bagaimana kemandirian pengelolaan otonomi daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya (Darise dalam (Azhar, 2021)). Transparansi sumber PAD yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah pada setiap muka laporan LHP kabupaten/kota.

Adanya transparansi atau keterbukaan dalam pengungkapan LKPD memang harus dilakukan karena PAD termasuk dalam mandatory disclosure atau pengungkapan wajib. Hal ini dikarenakan selain sebagai wujud kepatuhan terhadap PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Pemerintah, 2010), transparansi pengungkapan PAD juga diperlukan agar para pengguna laporan tersebut dapat melakukan evaluasi terkait realisasi dan alokasi anggaran, serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam mengupayakan efektifitas dan efisiensi anggaran untuk kebutuhan daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi meski pelaporan PAD ini sangat penting di dalam LKPD, dalam penelitian ini ditemukan bahwa nilai PAD berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan dengan tingkat pengungkapannya pada LKPD. Artinya, semakin tinggi nilai PAD yang diraih, maka akan semakin kecil tingkat pengungkapannya dalam LKPD. Sehingga pengungkapan LKPD tidak dipengaruhi oleh seberapa besarnya Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini sama seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Andriani et al., 2019).

Menurut Suminto dalam makalah Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara, diungkapkan bahwa terdapat 4 prinsip dasar pengelolaan PAD, antara lain adalah akuntabilitas berdasarkan pada hasil atau kinerja, adanya keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah, pemberdayaan manajer yang profesional, serta Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri, juga menghindari adanya duplikasi dalam pemeriksaan.

Oleh karena itu, demi melaksanakan 4 prinsip ini, maka perlu didukung oleh adanya transparansi Pendapatan Asli Daerah di dalam LKPD masing-masing kabupaten atau kota. Sehingga sesuai dengan Teori Steward, tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat, pengawas, pemeriksa, ataupun pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut dapat terlaksana.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa apakah variabel independen yang terdiri dari Ukuran Pemerintah Daerah (UPD), Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap variabel dependen yakni Pengungkapan LKPD. Penelitian ini berfokus pada 105 sampel data penelitian yang berupa LHP dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 2018-2020. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan penelitian yang dapat diambil adalah Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pengungkapan LKPD kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah selama periode 2018-2020. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (TKPD) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Pengungkapan LKPD kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah selama periode 2018-2020. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Pengungkapan LKPD kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah selama periode 2018-2020

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, E. F., & Haryanto, H. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun anggaran 2014-2016. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1), 1-14.
- Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2162-2184.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164-174.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 20, 1-26.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 864-874.
- Lutfia, F. I., & Bagana, B. D. (2018). Determinan tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014-2016). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 7(1).
- Nur, B., & Murwaningsari, E. (2020). Dampak ukuran dan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 4(2), 139-156.
- Pandansari, T. (2016). Tingkat ketergantungan, kompleksitas pemerintah, dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(3), 463.
- Pemerintah, I. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah, I. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah, I. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah, I. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Putri, W. M., & Arza, F. I. (2015). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan

laporan keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(32), 1–11.

Ramdhani, D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Propinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2).

Setyaningrum D & Syafitri F. (2012). *Analisis pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan*. Universitas Indonesia : Jakarta.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.